

KATA PENGANTAR

Laporan akuntabilitas kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2009, disusun berdasarkan Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999, disajikan dengan menggunakan standar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja yang baku, sebagaimana dimaksud di dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja ini, menguraikan hal-hal pokok berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, peran dan kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal selama tahun 2009, serta penjelasan mengenai pencapaian tujuan BKPM sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategik (Renstra) BKPM Tahun 2005-2009. Penjelasan tersebut kami anggap perlu, berkenaan dengan berakhirnya masa Renstra tersebut.

Dengan memperhatikan realisasi pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana diuraikan di dalam isi laporan akuntabilitas ini, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum target yang telah ditetapkan sebelumnya, seluruhnya dapat dicapai dengan baik.

Upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal yang dilakukan selama tahun 2009 telah berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009. Namun demikian, tantangan kedepan diperkirakan lebih besar mengingat target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 rata-rata sebesar 6,3–6,8 % pertahun yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2009 yaitu 5,6%.

Berkaitan dengan hal tersebut, BKPM akan terus melakukan berbagai upaya antara lain melakukan penyempurnaan peraturan dan kebijakan penanaman modal; meningkatkan kompetensi aparatur; melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada investor, meningkatkan promosi dan kerjasama investasi; serta melakukan penyebarluasan potensi dan peluang investasi bekerjasama dengan daerah. Dengan upaya tersebut diharapkan para penanam modal/investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga keberadaan BKPM akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh bangsa.

Demikian, semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memberikan manfaat.

Jakarta, 15 Maret 2010
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kepala,



Gita Irawan Wirjawan

Ikhtisar Eksekutif

Laporan akuntabilitas kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2009, merupakan media pertanggung jawaban kinerja BKPM kepada Bapak Presiden R.I. dan kepada publik, yang disampaikan melalui Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam laporan akuntabilitas tersebut disampaikan keberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan BKPM Tahun 2009, kendala yang dihadapi dan permasalahan yang terjadi, serta upaya yang akan dilakukan dalam tahun-tahun berikutnya dalam rangka mengatasi kendala yang ada, termasuk upaya untuk meningkatkan kinerja.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan, telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan Rencana Strategik BKPM Tahun 2005 – 2009, yang disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 sebagai pedoman utama, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009, disesuaikan dengan “*core business*” BKPM sebagaimana dijabarkan dalam tugas pokok, fungsi, kewenangan dan peran BKPM.

Salah satu prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berkaitan dengan masalah investasi adalah : “Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas” dan sasaran yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan investasi tersebut adalah “terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan kompetitif” sehingga mampu meningkatkan investasi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) sebesar 12,1 %.

Untuk mencapai sasaran pemerintah tersebut di atas, perlu dilakukan perbaikan iklim investasi yang diarahkan pada penyederhanaan prosedur, penciptaan iklim investasi yang kondusif, dan peningkatan daya tarik investasi agar investasi tumbuh tinggi, melalui kegiatan : ⁽¹⁾ penyederhanaan prosedur, peningkatan pelayanan dan pemberian fasilitas penanaman modal; ⁽²⁾ pengendalian pelayanan penanaman modal; ⁽³⁾ peningkatan promosi investasi di dalam negeri; ⁽⁴⁾ peningkatan promosi investasi di luar negeri; ⁽⁵⁾ peningkatan kerjasama penanaman modal. ⁽⁶⁾ pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); ⁽⁷⁾ penyelenggaraan dan

pengembangan “Indonesia Promotion Office (IPO)”; ⁽⁸⁾ pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana; ⁽⁹⁾ sinkronisasi dan harmonisasi peraturan-peraturan yang terkait dengan pengembangan penanaman modal; ⁽¹⁰⁾ penyusunan peta komoditi unggulan; ⁽¹¹⁾ perencanaan dan pengembangan penanaman modal; dan ⁽¹²⁾ peningkatan kapasitas kelembagaan investasi. Hal-hal tersebut di atas, telah dicapai dengan baik, sebagaimana diuraikan di dalam penjelasan lebih lanjut dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Keberhasilan kinerja BKPM dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan sasaran pemerintah tahun 2009 yang diselaraskan dengan visi BKPM dalam Renstra 2005-2009 yaitu **“terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menarik”** dapat ditunjukkan melalui **4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU)** sebagai berikut :

1. Jumlah persetujuan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) meningkat

Capaian persetujuan investasi PMDN tahun 2009 adalah sebesar Rp 195,50 trilyun, meningkat 47,11% jika dibandingkan dengan target renstra sebesar Rp 103,4 trilyun. Selanjutnya, jika nilai persetujuan investasi PMDN tahun 2009 dibandingkan dengan nilai persetujuan investasi PMDN tahun 2008 sebesar Rp 151,30 trilyun, maka terjadi peningkatan sebesar 29,21%.

2. Jumlah persetujuan investasi penanaman modal asing (PMA) sedikit menurun

Capaian persetujuan investasi PMA tahun 2009 adalah sebesar Rp 210,60 trilyun, jika dibandingkan dengan target renstra sebesar Rp 242,1 trilyun, maka nilai persetujuan PMA lebih rendah 14,95%. Selanjutnya, jika nilai persetujuan investasi PMA tahun 2009 dibandingkan dengan nilai persetujuan investasi PMA tahun 2008 sebesar Rp 333,00 trilyun, maka terlihat ada penurunan sebesar 36,76%.

Penurunan persetujuan investasi tersebut disebabkan oleh adanya imbas krisis ekonomi global yang dialami oleh banyak negara termasuk Indonesia, penilaian internasional tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang masih tinggi, sehingga para investor menunda keputusan untuk melakukan investasi di Indonesia.

Total nilai persetujuan investasi PMDN dan PMA selama tahun 2009 mencapai Rp 406,10 triliun, jika dibandingkan dengan target Renstra 2005-2009 sebesar Rp 345,74 triliun, nilai persetujuan investasi tahun 2009 meningkat Rp 60,36 triliun atau 17,46%. Selanjutnya, jika total nilai persetujuan investasi PMDN dan PMA tahun 2009 dibandingkan dengan total nilai persetujuan investasi PMDN dan PMA tahun 2008 sebesar Rp 484,30 triliun, maka terlihat ada penurunan sebesar 19,25%.

3. Jumlah PMDN yang merealisasikan investasi meningkat

Capaian realisasi investasi PMDN tahun 2009 sebesar Rp 37,8 triliun, jika dibandingkan dengan target renstra sebesar Rp 38,1 triliun, maka nilai realisasi investasi PMDN lebih rendah 0,79%. Selanjutnya, jika nilai realisasi investasi PMDN tahun 2009 dibandingkan dengan nilai realisasi investasi PMDN tahun 2008 sebesar Rp 20,40 triliun, maka terjadi peningkatan sebesar 85,29%.

4. Jumlah PMA yang merealisasikan investasi menurun

Capaian realisasi investasi PMA tahun 2009 sebesar Rp 98,1 triliun, jika dibandingkan dengan target renstra sebesar Rp 55,8 triliun, maka nilai realisasi investasi PMA meningkat 75,81%. Selanjutnya, jika nilai realisasi investasi PMA tahun 2009 dibandingkan dengan nilai realisasi investasi PMA tahun 2008 sebesar Rp 134,10 triliun, maka terlihat ada penurunan sebesar 26,85%.

Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya krisis ekonomi global yang mengimbas secara langsung ke Indonesia, fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah terhadap US dolar, kelangkaan US dolar di pasar internasional, sehingga para investor masih menunda keputusan untuk merealisasikan rencana investasinya di Indonesia.

Total nilai realisasi investasi PMDN dan PMA selama tahun 2009 mencapai Rp 135,90 triliun, jika dibandingkan dengan target Renstra BKPM periode 2005 – 2009, realisasi investasi tahun 2009 meningkat Rp 55,6 triliun atau 69,24 %. Selanjutnya, jika total nilai realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2009

dibandingkan dengan total nilai realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2008 sebesar Rp 154,50 triliun, maka terlihat ada penurunan sebesar 12,03%.

Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA tahun 2009 mencapai 1.469 proyek dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 303.537 orang. Jumlah tenaga kerja tersebut tidak termasuk tenaga kerja yang dipekerjakan dalam kegiatan pembangunan proyek PMDN dan PMA yang masih dalam tahap pembangunan proyek (belum berproduksi komersial).

Jumlah nilai persetujuan dan realisasi investasi yang disebutkan di atas, tidak termasuk investasi untuk sektor Minyak dan Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, investasi Porto Folio dan investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis.

Faktor-faktor kinerja lainnya yang juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur pendukung pencapaian tujuan dan sasaran BKPM sesuai dengan sasaran pemerintah dalam RKP tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan penanaman modal meningkat.

Rata-rata waktu penyelesaian permohonan pelayanan dan perizinan penanaman modal hanya mencapai 5 hari dibandingkan dengan target penyelesaian 10 hari dalam SOP atau mengalami percepatan 100%. Peningkatan efektivitas pelayanan penanaman modal ini telah dilakukan melalui penyederhanaan prosedur pemberian perizinan penanaman modal dan penyempurnaan terhadap SOP menjadi lebih sederhana, transparan, dan dengan waktu penyelesaian yang lebih cepat. Pelayanan penanaman modal dilakukan dengan sistem otomasi/komputerisasi melalui *front office dan back office*. Selain itu, dalam rangka peningkatan pelayanan tersebut juga telah disiapkan sarana pelayanan yang lebih baik.

2. Pemberian stimulus penanaman modal tetap menarik bagi investor.

Peningkatan pelayanan fasilitas penanaman modal, juga dilakukan melalui pemberian fasilitas penanaman modal dalam bentuk keringanan bea masuk atas impor barang modal (peralatan & mesin) bagi proyek PMDN dan PMA yang sedang melakukan pembangunan proyeknya. Fasilitas keringanan bea masuk juga diberikan atas impor bahan baku bagi proyek yang mulai melaksanakan kegiatan komersialnya.

3. Perkembangan nilai realisasi investasi PMDN dan PMA menunjukkan tren yang semakin meningkat

Perkembangan nilai realisasi penanaman modal menunjukkan tren yang meningkat, terlihat dari data sejak 1990-2009.

4. Penyediaan informasi penanaman modal terkini lebih ditingkatkan

Informasi penanaman modal terkini mengenai regulasi; potensi sumber daya dan peluang usaha daerah dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi Indonesia, secara berkesinambungan ditingkatkan melalui penyusunan peta komoditi unggulan; pemetaan investasi sektor-sektor unggulan bidang industri baja, otomotif, perkapalan dan elektronika, industri petrokimia terintegrasi dengan oil refinernya, industri bahan baku farmasi, industri nikel, elektronika dan komponennya, cluster industri makanan dan minuman; dan pemetaan investasi industri agro diantaranya pengembangan investasi CPO, kakao dan karet serta energi alternatif.

5. Peningkatan promosi investasi dilakukan lebih terarah dan *targeted*.

Peningkatan promosi investasi dilaksanakan dalam rangka penyebarluasan informasi, potensi dan peluang penanaman modal di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan secara efisien dan efektif, termasuk pelaksanaan koordinasi promosi antara pusat dan daerah melalui pelaksanaan *market research* kebijakan dan insentif penanaman modal negara pesaing, pelaksanaan *market intelligence* kebijakan dan potensi penanaman modal negara target promosi, pendirian *Indonesian Investment Promotion Centre* (IIPC), pelaksanaan fasilitasi minat investasi sebagai tindak lanjut penerimaan misi investasi, pelaksanaan Marketing

Investasi Indonesia (MII), pelaksanaan *rebranding* dalam rangka membangun citra Indonesia melalui media dalam negeri dan internasional, penyelenggaraan Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) dan seminar investasi, penyelenggaraan *talkshow*, penerimaan dan pendampingan misi investasi dari luar negeri, penyelenggaraan pameran di dalam dan luar negeri serta penyiapan dan penyeberluasan sarana promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik (*website*). Seluruh kegiatan promosi investasi tahun 2009, telah memberikan hasil yang sangat signifikan dalam menarik investasi ke Indonesia, terlihat dari meningkatnya persetujuan dan realisasi investasi.

6. Kesepakatan kerjasama dan fasilitasi penanaman modal di dalam dan luar negeri meliputi regional, bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal sangat penting untuk dicapai.

Selama ini BKPM telah melaksanakan berbagai kegiatan kerjasama dalam rangka memperjuangkan posisi Indonesia dalam perundingan dengan pihak asing dibidang penanaman modal. Kerasnya persaingan antar negara untuk menarik investasi asing ke negaranya sendiri memerlukan upaya yang terus menerus agar kelangsungan investasi Indonesia dapat dijaga dengan baik, dengan harapan investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia jumlahnya akan meningkat. Dalam tahun 2009, BKPM telah mengikuti perundingan kerjasama penanaman modal yang menghasilkan 84 laporan, meningkat 123,53% dibandingkan dengan target sebelumnya.

7. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sudah mulai diterapkan.

SPIPISE ini dimaksudkan untuk membantu penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka menciptakan transparansi informasi, kemudahan, penyederhanaan dan percepatan proses penyelesaian perizinan penanaman modal. Dalam tahun 2009 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal, diikuti dengan penerbitan 4 Peraturan Kepala BKPM dan 15 Peraturan tentang pelimpahan/pendelegasian wewenang dari Kementerian/Lembaga terkait

penanaman modal. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

8. Penyempurnaan peraturan penanaman modal dan pemberian dalam kepastian hukum meningkat.

Badan Koordinasi Penanaman Modal telah melakukan sinkronisasi pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal dan harmonisasi kebijakan di pusat dan daerah. Selain itu, dilakukan pula kajian-kajian hukum penanaman modal asing untuk digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan peraturan kebijakan bidang penanaman modal; dan memberikan bantuan hukum serta penyelesaian sengketa hukum yang dihadapi oleh penanam modal.

9. Pengembangan penanaman modal melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan ditingkatkan

Salah satu alternatif pengembangan investasi ke depan adalah pengembangan investasi yang diarahkan sejalan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal akan senantiasa bekerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Dalam rangka menyikapi tahun 2010 dan sejalan dengan meningkatnya target pertumbuhan ekonomi, maka target investasi akan semakin meningkat pula. Oleh karena itu harus dilakukan upaya sungguh-sungguh, sehingga peran BKPM dapat dirasakan manfaatnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui upaya peningkatan realisasi investasi. Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bidang investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal akan melakukan upaya strategik, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian peraturan dan kebijakan pemerintah yang terkait

- dengan penanaman modal, pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana lain yang dibutuhkan investor.
2. Meningkatkan upaya promosi investasi terpadu dan kerjasama investasi di dalam dan luar negeri.
 3. Memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam perundingan kerjasama di bidang penanaman modal, melalui upaya koordinasi dengan interdep instansi sektor terkait dan juga dengan dunia usaha untuk menyusun posisi Indonesia dalam menghadapi setiap kerjasama/perundingan/perjanjian internasional guna peningkatan investasi.
 4. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap proyek penanaman modal, termasuk membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh investor.
 5. Menyiapkan potensi investasi unggulan yang prospektif bagi investor diantaranya:
 - a) *Master plan* investasi industri manufaktur; pengembangan investasi industri pupuk, semen, smelter tembaga; industri perkapalan untuk mendukung transportasi gas;
 - b) Pengembangan investasi *food estate*; bahan bakar nabati;
 - c) Pemetaan dan pengembangan investasi pelabuhan untuk ekspor.
 6. Mengintensifkan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal di pusat dan daerah.
 7. Meningkatkan kompetensi aparatur di pusat dan daerah, khususnya untuk meningkatkan pelayanan dan operasional Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Dari upaya-upaya tersebut diharapkan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing masih akan tumbuh, sehingga dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta, Maret 2010

LAMPIRAN :
PENGUKURAN KINERJA SASARAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2009

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN	KETERANGAN
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1. Meningkatnya promosi dan kerjasama penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah persetujuan penanaman modal dalam negeri 	Rp.103,42 trilyun	Rp.195,50 trilyun	189,04	
		<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah persetujuan penanaman modal asing 	Rp.242,32 trilyun	Rp.210,60 trilyun	86,91	
2.	2. Meningkatnya Investasi	<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah PMDN yang merealisasikan investasi 	Rp.38,09 trilyun	Rp.37,80 trilyun	99,24	
		<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah PMA yang merealisasikan investasi 	Rp.56,03 trilyun	Rp.97,20 trilyun	173,48	
3.	3. Meningkatnya daya tarik penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah sektor / bidang usaha di daerah yang diminati investor 	24 sektor PMDN 24 sektor PMA	22 sektor PMDN 23 sektor PMA	91,67 95,83	
		<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah investor yang berminat pada komoditi investasi yang dipamerkan / dipromosikan 	140 Letter Of Intent	140 Letter Of Intent	100,00	
		<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah investor / perusahaan yang memanfaatkan kebijakan / stimulus di bidang penanaman modal 	126 Proyek PMDN 187 proyek PMA	110 proyek PMDN 138 proyek PMA	87,30 73,80	
		<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah stimulus investasi yang dimanfaatkan 	US\$.10,9 miliar PMDN US\$.32,4	5,4 miliar PMDN 22,5 miliar	49,54 69,44	

		oleh investor	milliar PMA	PMA		
4.	4. Meningkatnya pelayanan penanaman modal yang lebih efektif	<ul style="list-style-type: none"> o Ketepatan waktu penyelesaian perizinan penanaman modal 				
		<ul style="list-style-type: none"> o SP Baru, Perluasan dan Merger /alih status 	10 Hari	5 Hari	200,00	
		<ul style="list-style-type: none"> o SP Alih Status 	7 Hari	5 Hari	140,00	
		<ul style="list-style-type: none"> o SP Perubahan dan KPPA 	5 Hari	4 Hari	125,00	
		<ul style="list-style-type: none"> o Izin Usaha Tetap 	10 Hari	6 Hari	166,00	
		<ul style="list-style-type: none"> o APIT 	5 Hari	3 Hari	166,00	
		<ul style="list-style-type: none"> o RPTK, TA.01.IMTA 	4 Hari	3 Hari	133,00	
		<ul style="list-style-type: none"> o Pabean 	14 Hari	5 Hari	280,00	
5.	5. Meningkatnya koordinasi penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah prosedur perizinan penanaman modal yang disederhanakan 	7 SOP	18 SOP	257,14	
		<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah peraturan penanaman modal yang disempurnakan 	1 peraturan	20 peraturan	2000,00	
		<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah daerah yang menerapkan kebijakan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu 	33 daerah	3 daerah	9,10	
6.	6. Meningkatnya pemahaman aparatur daerah, perusahaan PMA dan PMDN terhadap	<ul style="list-style-type: none"> o Jumlah permasalahan di bidang penanaman modal yang berhasil diselesaikan 	35 kasus	24 kasus	68,57	

	ketentuan pelaksanaan penanaman modal					
7.	7. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pola-pola kemitraan UKM pada proyek penanaman modal	Jumlah kemitraan UKM dengan PMA dan PMDN yang menerapkan rekomendasi pola kemitraan yang saling menguntungkan	60 UKM PMA 700 UKM PMDN	37 UKM PMA 795 UKM PMDN	61,67 113,57	
8.	8. Terciptanya standarisasi pelayanan penanaman modal	Jumlah daerah yang menerapkan SOP pelayanan penanaman modal	33 provinsi 500 Kab/ Kota	3 Provinsi -	9,09	

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2009 : Rp 376.815.006.000,0 (100,00 %)
 Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2009 : Rp 311.602.419.289,0 (82,69 %)
 Sisa Anggaran (Penghematan) : Rp 65.212.586.711,0 (17,31 %)